

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi D. Bahri, dkk, 2019, *Perjuangan Keadilan Agraria*, Insist Press, Yogyakarta.
- Ahmad Muhsin, Laila Nafisah, dan Yuni Siswanti, 2019, *Surat Kekancingan Tanah Sultan Ground Upaya Mendapatkan Izin Memanfaatkan Tanah Keraton Yogyakarta*, Deepublish, Yogyakarta.
- C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 1992, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Cetakan III, Penerbit Alumni, Bandung.
- Franz Magnis-Suseno, 1984, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Gramedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2009, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kristin G Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research*, tanpa tahun, Mc Graw Hill, Boston Burr Ridge, IL Dubuque, IA Madison, WI New York San Francisco St. Louis Bangkok Bogotá Caracas Kuala Lumpur Lisbon London Madrid Mexico City Milan Montreal New Delhi Santiago Seoul Singapore Sydney Taipei Toronto.
- Mohamad Roem, dkk, *Takhta Untuk Rakyat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2021, *Kajian Terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta*, Nusamedia, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2021, *Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Nusamedia, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2021, *Sultan Grond di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta*, Nusamedia, Yogyakarta.
- Nur Aini, 2011, *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta setelah Reorganisasi 1917*, STPN Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hajon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

- Pusat Data dan Analisis Tempo, 2020, *Isu Agraria Tanah Keraton Yogyakarta*, Tempo Publishing, Jakarta.
- Ricklefs. M. C., 2002, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792 : Sejarah Pembagian Jawa* (terjemahan: Hartono Hadikusumo dan E. Setiyawati Alkhatab), Mata Bangsa, Yogyakarta.
- Robert M. MacIver dan Charles H. Page, 1971, *Society: An Introductory Analysis*, Macmillan and Co Ltd., The Great Britain.
- Ronny Hanitijo Soemitro dalam Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Selo Soemardjan, 1991, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Dan Politik Agraria*, Karunia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dalam Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Sri Hajati, dkk, 2018, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, Surabaya.
- Talcott Parsons, 2005, *The Social System*, edisi 2, Taylor abd Francis e-Library.
- Tim Penulis, *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2020*, Yogyakarta: Pemerintahan Kota Yogyakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Tim Penyusun, 2017, *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta.
- Zuhro, 2018, *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal

- Abd Wahab, 2022, “Kekuatan Hukum Hak Atas Tanah Kesultanan yang Dikuasai Masyarakat”, *Dinamika*, Volume 28 No 5 Bulan Januari, Universitas Islam Malang.
- Andini Salsabila, 2023, “Eksistensi Tanah Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional”, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 3(02), 21–30, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Erna Sri Wibawanti, dkk, 2024, “Kepastian dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 31:3 (2024), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Hamsar Suci Amalia, 2023, “Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasar Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Ilmiah*, Vol.1/No. 2/November 2023, Kampus Akademik Publishing, Semarang.
- JH Sinaulan, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Volume 04 Nomor 01 Februari, Universitas Jayabaya.
- Maulida Illiyani, 2020, “Polemik Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasca-Penerbitan Undang-undang No. 13 Tahun 2021 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 22 No. 3, LIPI Press.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Bayu, 2023, “Analisis Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan BPN Yogyakarta dan Keraton dalam Dua Prinsip Sistem Pengelolaan Tanah Setelah Berlakunya UU No.13 Tahun 2012 dari Perspektif Hukum Nasional”, *Novum: Jurnal Hukum*, Universitas Negeri Surabaya.
- Novi Achmadiyah, 2016, Implikasi Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakualaman Ground di Kabupaten Kulon Progo, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 1, Juli 2016, Universitas Islam Indonesia.
- Nugroho H., 2017, “Dinamika Konflik Tanah Kasultanan: Perspektif Sosio-legal”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(3), Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Raharja, 2014, Pengaruh Sri Sultan Hamengku Buwono I pada Seni Karawitan Kraton Yogyakarta, Jurnal Resital, Vol. 15 No. 1, Juni 2014, Institut Seni Yogyakarta.

Rufaida Putri, 2021, “Kajian Penggunaan Tanah Sultan Ground Tanpa Serat Kekancingan di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Volume 10 No. 2, Universitas Negeri Yogyakarta.

Ryan Alfi S, 2014, “Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah”, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, Edisi 5 Volume 2, Tadulako University.

Umar, J. (2021). “Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta”, Vol. 1(2), 114–119, *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*.

Zani, A. (2022). “Sejarah Pengaturan dan Status Sultan Ground pada Daerah Istimewa Yogyakarta: Sebuah Pendekatan Filsafat Hukum Agraria”, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 2(5), 24–27. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

C. Penelitian

Alvian Vinusti P, 2022, Praktek Penyalahgunaan Serat Kekancingan Hak Magersari Atas Tanah Sultan Ground Dengan Cara Dialihkan Kepada Pihak Lain Di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Arjun Ilham Pamungkas, 2023, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Giovanni Oryssa Sativa, 2020, Peran Kraton Kasultnanan Yogyakarta Dalam Mencegah Peralihan Sultan Ground Menjadi Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mantiko Sumanda M, 2008, *Jaminan Kepastian Hukum terhadap Status Tanah Sultan Ground Di Provinsi DIY*, Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muhammad Girindra Wiryakumara, 2021, Perolehan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik Kasultanan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Di Kota Yogyakarta, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pamela Maher Wijaya, 2011, *Kekuasaan Politik Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Dalam Persepektif Partai Politik (Telaah Antropologi terhadap Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta)*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 280 yang telah dicetak ulang. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112 yang telah dicetak ulang. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 72 yang telah dicetak ulang. Sekretariat Negara. Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246. Kementrian Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 49. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

E. Media Internet

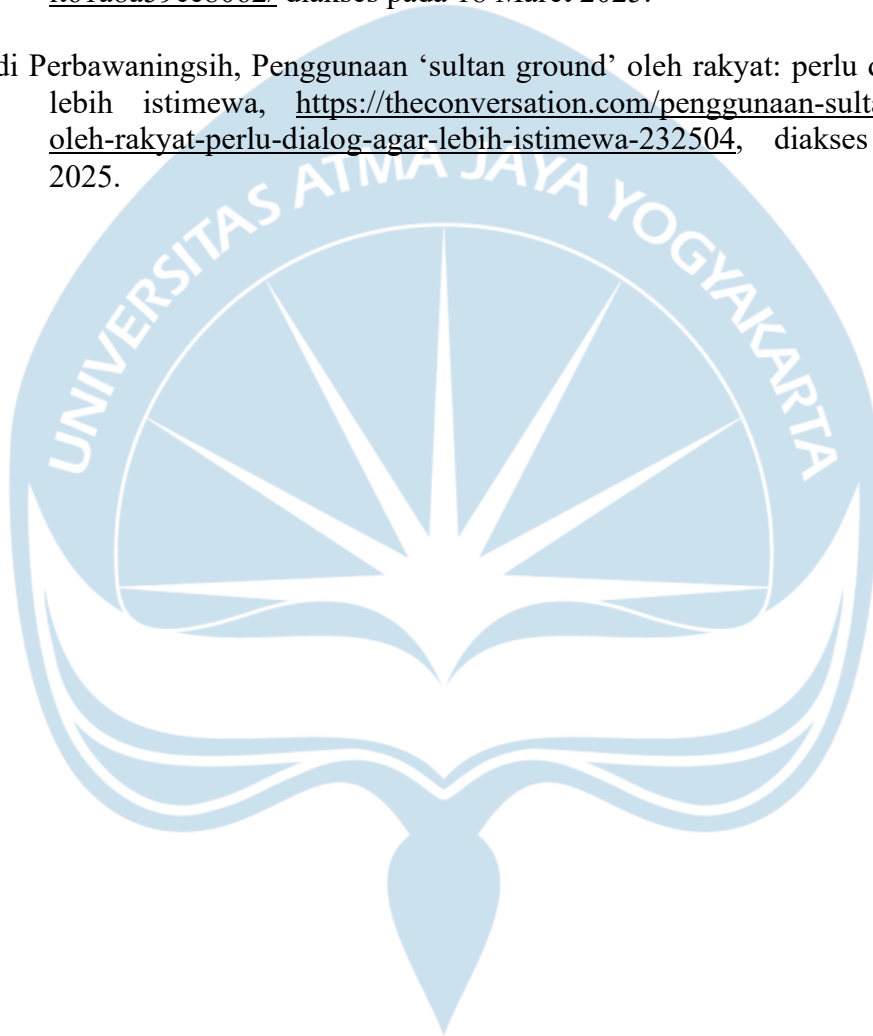
Dian Dwi Jayanti, 2023, Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/#_ftn1, diakses 18 Maret 2025.

KBBI Pengertian Masyarakat <https://kbbi.web.id/masyarakat> diakses pada 18 Maret 2025.

Tata Ruang dan Bangunan Kawasan Inti Keraton Yogyakarta, <https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting/4-tata-ruang-dan-bangunan-kawasan-inti-keraton-yogyakarta/>, diakses 17 Mei 2025

Tim Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> diakses pada 18 Maret 2025.

Yudi Perbawaningsih, Penggunaan ‘sultan ground’ oleh rakyat: perlu dialog agar lebih istimewa, <https://theconversation.com/penggunaan-sultan-ground-oleh-rakyat-perlu-dialog-agar-lebih-istimewa-232504>, diakses 28 Mei 2025.



LAMPIRAN

Lampiran 1



(Yutta Ardra, 2025)

Wawancara dengan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 2025

Lampiran 2



(Yutta Ardra, 2025)

Wawancara dengan Kantor Panitikismo Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 10 Juni 2025

Lampiran 3



(Yutta Ardra, 2025)
Wawancara dengan Notaris dan PPAT Margaretha Retnaning Adji pada
tanggal 13 Juni 2025

Lampiran 4



(Yutta Ardra, 2025)
Pengambilan data di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa
Yogyakarta pada tanggal 26 Juni 2025